

## ANALISIS

### Menakar

# Kekalahan Telak Jokowi dari Prabowo di Sumatra Barat

CNN Indonesia | Selasa, 23/04/2019 08:32 WIB



Sejumlah variabel menjadi penyebab kekalahan Jokowi dari Prabowo di Sumbar pada Pilpres 2019.

(CNN Indonesia/Hesti Rika).

Jakarta, CNN Indonesia -- Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengalami kekalahan telak dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Sumatra Barat berdasarkan hasil *quick count* atau hitung cepat dalam Pilpres 2019 ini. Kombinasi falsafah orang minang 'ABS-SBK' dan tebaran hoaks menjadi salah satu penyebab paslon nomor 01 itu keok.

Berdasarkan hasil hitung cepat Pilpres 2019 yang dikeluarkan oleh sejumlah lembaga survei menyatakan Jokowi tidak memperoleh suara lebih dari 16 persen.

Hasil hitung cepat Indikator Politik Indonesia menyatakan Jokowi-Ma'ruf hanya meraup 15,88 persen. Mereka kalah dari pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 yang memperoleh 84,12 persen.

Sementara hasil hitung cepat Poltracking menyatakan Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 12,09 persen, kalah dari Prabowo-Sandi yang memperoleh 87,91 persen.

Bahkan Indo Barometer menyatakan bahwa Jokowi-Maruf hanya kebagian 9,55 persen, kalah telak dari Prabowo-Sandi yang mengantongi 90,45 persen.

Hasil hitung cepat itu semakin menguatkan bahwa Sumbar memang merupakan basis

suara Prabowo, sejak Pilpres 2014. Saat berduet dengan Hatta Rajasa di Pilpres 5 tahun lalu, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) itu meraup 1.797.505 suara atau 76,9 persen. Sementara Jokowi hanya memperoleh 539.308 suara atau 23,1 persen saat tandem dengan Jusuf Kalla ketika itu.

**Lihat juga:** [Bupati Madina Sebut Hoaks Penista Agama Picu Jokowi Kalah](#)

Hasil hitung cepat Pilpres 2019 ini juga menunjukkan bahwa berbagai upaya Jokowi untuk meraup suara lebih banyak dari Pilpres 2014 di Sumbar tidak berhasil. Misalnya dengan cara mengunjungi Sumbar beberapa kali.

Tercatat, Jokowi kerap menyambangi Nagari Minangkabau sejak menjabat sebagai Presiden. Kunjungan pertama dilakukan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu ke Kabupaten Padang Pariaman guna meninjau penggunaan dana desa di Kecamatan Enam Lingkung dan meresmikan Pantai Mandeh sebagai wisata unggulan Kabupaten Pesisir Selatan, 8 hingga 10 Oktober 2015.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga sempat menengok rumah proklamator Muhammad Hatta di Kota Bukit Tinggi.

Setahun berselang, 5 sampai 6 Juli 2016, Jokowi menjadikan Kota Padang sebagai tempat merayakan Idul Fitri. Menurut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang melaksanakan salat Idul Fitri bersama masyarakat Kota Padang.

Jokowi pun sempat mengunjungi Sumbar untuk melakukan salat Jumat Masjid Raya Sumatra Barat, Padang pada 9 Februari 2018.

Upaya Jokowi memperoleh jumlah suara yang lebih baik di Sumbar juga terlihat dari penyelenggaraan Kampanye Akbar, di mana sejumlah kepala daerah dan grup musik Slank hadir serta terlibat di dalamnya.

Namun semua upaya itu tampak sia-sia, setidaknya jika melihat hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei hingga hari ini.



Indikasi kekalahan Jokowi dari Prabowo di Sumbar sudah terlihat sejak jauh hari ketika seruan ganti presiden begitu kuat di sana. (CNN Indonesia/Andry Novelino).

### Antipati terhadap Jokowi

Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi mengatakan falsafah 'adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah' atau ABS-SBK merupakan salah satu variabel yang menyebabkan kegagalan Jokowi meraup suara lebih banyak di Pilpres 2019.

Menurut dia, berbagai gagasan atau pemikiran dari orang-orang di sekitar Jokowi justru melahirkan rasa antipati dari masyarakat Sumbar untuk memilih capres berstatus petahana itu.

**Lihat juga:** [Bupati Madina Mundur, Edy Rahmayadi Sindir soal Netralitas](#)

Falsafah ABS-SBK, dalam konteks ini warga Sumbar mempraktikkan 'religius feeling'. Sementara diketahui bersama eks Wali Kota Solo itu dikelilingi kelompok multikultur, agama, pemikiran. Namun label isu PKI membuat warga Sumbar antipati terhadap Jokowi.

"Terutama dari segi agama, walau banyak kebijakan seperti Islam nusantara, [tapi] pemahaman komunisme membuat orang tidak simpati. Rasa antipasti itu yang justru muncul," kata Asrinaldi kepada *CNNIndonesia.com*, Senin (22/4).

Dia berpendapat, rasa antipati untuk memilih Jokowi semakin meningkat ketika falsafah 'ABS-SBK' yang dipegang warga Sumbar kian diperparah isu-isu terkait agama dan suku yang bertebaran dibungkus oleh berita bohong alias hoaks oleh sekelompok orang.

Menurut dia, kabar-kabar hoaks tersebut sangat mudah sampai dan didengar oleh masyarakat Sumbar yang sudah sangat mengenal teknologi informasi saat ini.

"Pemanfaatan media sosial terutama WhatsApp dan itu terbukti efektif. Masyarakat Sumbar sudah melek teknologi," ujarnya.

Variabel lain penyebab kegagalan Jokowi, lanjutnya, adalah terkait cara pandang masyarakat Sumbar terhadap figur pemimpin.

Dia menerangkan, kearifan lokal di Minangkabau mengenal istilah 'ketakahan', di mana seorang pemimpin harus memiliki karakter tegas, ramah, disiplin, dan bertanggung jawab.

Ketika karakter itu dilihat dalam dua sosok capres di Pilpres 2019, lanjut dia, pilihan masyarakat Sumbar jatuh kepada Prabowo yang notabene berlatarbelakang militer.

"Terkait *political invasion* seseorang memahami pemimpin. Di Minangkabau ada kearifan lokal namanya ketakahan, itu terkait karakter orang. Ketika itu diperbandingkan [masyarakat] minang cenderung ke Prabowo," ujar Asrinaldi.

**Lihat juga:** [PDIP Nilai Pengunduran Diri Bupati Mandailing Natal Tak Elok](#)

Dia menilai variabel ketakahan ini sudah lama digunakan masyarakat Sumbar dalam memilih capres, tepatnya sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maju sebagai capres pada Pilpres 2004 silam.

Asrinaldi menyampaikan, kegagalan upaya Jokowi untuk memperoleh suara lebih besar di Pilpres 2019 lalu sebenarnya sudah terlihat sebelum hari pemungutan suara. Saat itu animo masyarakat menyerukan pergantian presiden sangat tinggi.

Jokowi memang tak bisa berbuat banyak di Pilpres 2019 dalam merengkuh hati masyarakat Sumbar. Kombinasi variabel itu dinilai menjadi alasan mantan Gubernur DKI itu keok. Apalagi, tambah Asrinaldi, lumbung suara Jokowi di Sumbar sejauh ini hanya berada di dua kabupaten, yakni Kepulauan Mentawai dan Dharmasraya.

**(mts/osc)**